

## Bantuan Sosial Menjadi Ketergantungan: Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan di Kabupaten Pidie Jaya

Taufik<sup>1</sup>, Khairunnisa<sup>2</sup>, Said Amirulkamar<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan,  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

<sup>1</sup>[taufik.fisip@ar-raniry.ac.id](mailto:taufik.fisip@ar-raniry.ac.id), <sup>2</sup>[210802008@student.ar-raniry.ac.id](mailto:210802008@student.ar-raniry.ac.id), <sup>3</sup>[said.amirulkamar@ar-raniry.ac.id](mailto:said.amirulkamar@ar-raniry.ac.id)

Corresponding author: [taufik.fisip@ar-raniry.ac.id](mailto:taufik.fisip@ar-raniry.ac.id)

Submitted: 22/06/2025; Revised: 15/08/2025; Published: 19/08/2025

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.366>

### Abstract

*The Family Hope Program (PKH) is one of the Indonesian government's primary instruments for poverty alleviation through conditional cash transfers. In Bandar Dua Subdistrict, Pidie Jaya Regency, however, its implementation continues to face challenges, particularly inaccurate beneficiary data and a high level of dependency among recipient households. This study aims to evaluate the implementation of PKH, focusing on data accuracy and its impact on household self-reliance. A qualitative approach was adopted, employing in-depth interviews, field observations, and document reviews related to program execution. Data were analyzed thematically to identify recurring issues and contributing factors. The findings indicate that several beneficiaries no longer meet the eligibility requirements yet remain in the program due to weak data updating and verification mechanisms. Furthermore, a significant proportion of recipients exhibit strong dependence on PKH assistance, which hinders their transition toward economic independence. This dependency is largely influenced by the limited effectiveness of empowerment initiatives and the insufficient use of assistance for income-generating activities. Based on these findings, it is recommended that beneficiary data verification be conducted regularly with the active involvement of village authorities, and that economic empowerment components be reinforced. Strengthening these aspects will help ensure that PKH functions as a transformative intervention aimed at fostering self-reliance, rather than merely serving as a palliative measure for short-term poverty relief.*

**Keywords:** Family Hope Program, Data Accuracy, Beneficiaries, Poverty Alleviation, Economic Empowerment.

### Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu instrumen utama pemerintah Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui bantuan tunai bersyarat. Namun, pelaksanaannya di Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait ketidakakuratan data penerima manfaat dan tingginya tingkat ketergantungan rumah tangga penerima. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PKH, dengan

fokus pada akurasi data dan dampaknya terhadap kemandirian rumah tangga. Pendekatan kualitatif digunakan dengan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen terkait implementasi program. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi permasalahan yang berulang dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian penerima manfaat tidak lagi memenuhi kriteria kelayakan, namun tetap terdaftar akibat lemahnya mekanisme pemutakhiran dan verifikasi data. Selain itu, sebagian besar penerima menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan PKH, yang menghambat transisi menuju kemandirian ekonomi. Ketergantungan ini dipicu oleh rendahnya efektivitas program pemberdayaan dan minimnya pemanfaatan bantuan untuk kegiatan produktif. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar verifikasi data penerima dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa, serta memperkuat komponen pemberdayaan ekonomi. Penguatan ini diharapkan dapat menjadikan PKH sebagai intervensi transformatif yang mendorong kemandirian, bukan sekadar solusi sementara untuk kemiskinan.

**Kata kunci:** Program Keluarga Harapan, Akurasi Data, Penerima Manfaat, Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Ekonomi

## Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan struktural yang telah lama menjadi tantangan besar bagi pembangunan nasional. Meski Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam dua dekade terakhir, namun kesenjangan kesejahteraan dan angka kemiskinan tetap menjadi persoalan signifikan, terutama di daerah-daerah terpencil dan perdesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa per September 2024 persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. Angka ini menunjukkan adanya penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Berbagai strategi dan program telah diinisiasi oleh pemerintah selama bertahun-tahun untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Upaya ini sejalan dengan tujuan global pengentasan kemiskinan yang tercantum dalam agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mengusung program “*No Poverty*”, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia. Fokus utama dari tujuan ini adalah memberdayakan individu yang hidup dalam kondisi rentan agar dapat keluar dari siklus kemiskinan secara berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah merancang, serta mengimplementasikan berbagai program pengentasan kemiskinan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan

nasional. Salah satu program yang menonjol adalah *Program Keluarga Harapan (PKH)*. Program ini merupakan contoh konkret upaya pengalokasian sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui skema bantuan bersyarat di bidang pendidikan dan kesehatan. Intervensi ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku positif dalam masyarakat (Erfain et al., 2021; Yasin & Rizqie Aris, 2023).

Dasar kebijakan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia didasari pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa bantuan sosial merupakan hak setiap warga negara untuk mencapai kehidupan yang layak. Ketentuan pelaksanaan PKH diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 yang mengatur mekanisme penyaluran bantuan sosial secara non-tunai guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Secara teknis, PKH diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, yang memuat ketentuan mengenai tujuan, sasaran, komponen penerima, serta mekanisme pelaksanaan program secara komprehensif. Kehadiran program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

PKH telah menunjukkan sejumlah hasil positif terkait kenaikan pengeluaran rumah tangga serta akses pendidikan dan kesehatan bagi penerima manfaat (Simarmata & Siahaan, 2022; Taryono et al., 2023; Yunus & Fardania, 2024). Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam aspek-aspek ini, banyak keluarga masih terjebak dalam kemiskinan jangka panjang. Pertumbuhan penerima manfaat melambat dan beberapa keluarga tidak mencapai tingkat kemandirian yang diharapkan (Hartarto & Wardani, 2023). Temuan ini menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi untuk program-program semacam ini agar dapat memberikan dampak yang signifikan dalam jangka panjang.

Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh turut menghadapi permasalahan kemiskinan. Meskipun memperoleh manfaat dari alokasi

Dana Otonomi Khusus (Otsus) sejak tahun 2008, dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pidie Jaya masih terbatas. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Pidie Jaya pada 2024 masih berada di atas rata-rata nasional. Perkembangan persentase penduduk miskin dalam 10 tahun (2015-2024) di Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1**  
**Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pidie Jaya 2015-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Persentase Kemiskinan</b>	<b>Rata-Rata Nasional</b>
2015	21,4%	11,13%
2016	21,18%	10,86%
2017	21,82%	10,64%
2018	20,17%	9,82%
2019	19,31%	9,41%
2020	19,19%	9,78%
2021	19,55%	10,14%
2022	18,45%	9,54%
2023	18,4%	9,36%
2024	18,28%	8,57%

Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya 2025

Tren persentase penduduk miskin di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2015-2024 secara konsisten memiliki tingkat kemiskinan yang hampir dua kali lipat dari rata-rata nasional. Pada tahun 2015, tingkat kemiskinan di Pidie Jaya tercatat sebesar 21,4%, sementara rata-rata nasional berada pada 11,13%. Hingga tahun 2024, angka tersebut menurun menjadi 18,28% untuk Pidie Jaya dan 8,57% untuk nasional.

Secara umum, data di atas menunjukkan tren penurunan, meskipun penurunannya tidak berlangsung secara linear. Pada periode 2015–2019, penurunan cukup signifikan di kedua level, namun pada 2020–2021 terjadi kenaikan kembali yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Setelah itu, pada 2022–2024, angka kemiskinan kembali turun, tetapi laju perbaikannya di Pidie Jaya cenderung lebih lambat dibandingkan nasional.

Kesenjangan kemiskinan antara Pidie Jaya dan rata-rata nasional tetap besar, berada di kisaran 8–10 poin persentase sepanjang periode. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun

kondisi nasional membaik, percepatan penurunan kemiskinan di Pidie Jaya belum cukup untuk mengecilkan jarak tersebut, sehingga diperlukan intervensi kebijakan maupun program yang lebih terarah. Angka ini secara otomatis menempatkan Pidie Jaya menjadi urutan keempat kabupaten/kota termiskin di Provinsi Aceh.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie Jaya menjadi sebuah harapan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai permasalahan. Di Kecamatan Bandar Dua, masyarakat memprotes karena kondisi ekonomi mereka yang tergolong kurang mampu tidak terakomodasi dalam daftar penerima bantuan PKH (Habapublik, 2025). Fenomena ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam implementasi PKH. Penerima PKH yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin justru diterima oleh pihak-pihak yang tidak memenuhi kriteria, hal ini mengakibatkan penerima PKH tidak tepat sasaran.

Dalam persepektif evaluasi kebijakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ada tantangan dalam hal implementasi dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih banyak penerima yang tidak memenuhi syarat atau menghadapi kendala dalam mengakses program (Bangun et al., 2019; Pangestu, 2022). Selain itu, tingkat akurasi dalam penyaluran bantuan juga menjadi isu, yang menyebabkan ketidakmerataan dalam distribusi bantuan di sejumlah daerah (Kurniawan et al., 2021).

Kedua, banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa walaupun PKH dirancang untuk membangkitkan minat masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan, dampak jangka panjang terhadap aspirasi pendidikan orang tua belum sepenuhnya diteliti (Hartarto & Wardani, 2023; Nuraida, 2019). Dalam hal ini, gap penelitiannya ada pada pemahaman tentang bagaimana program ini sebenarnya memengaruhi perubahan perilaku dan aspirasi pendidikan di tengah keluarga penerima manfaat.

Ketiga, meskipun terdapat evaluasi terkait pencapaian indikator-indikator seperti peningkatan kesehatan dan pendidikan, banyak studi yang berfokus pada hasil jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang atau ketahanan ekonomi dari keluarga setelah program berakhir (Argisitawan et al., 2022; Mursyidah, 2017). Penelitian

lebih lanjut yang meneliti keberlanjutan dampak sosial dan ekonomi setelah keluarnya program bisa memberikan wawasan yang lebih mendalam.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi secara komprehensif dampak Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie Jaya dengan menekankan pada aspek ketepatan sasaran, perubahan perilaku, serta keberlanjutan manfaat pasca-program. Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi adanya tantangan implementasi, termasuk *inclusion error* dan *exclusion error* dalam penyaluran bantuan sosial (Bangun et al., 2019; Kurniawan et al., 2021; Pangestu, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis sejauh mana PKH mampu mendorong transisi penerima manfaat dari ketergantungan pada bantuan menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

### **Tinjauan Pustaka**

Evaluasi kebijakan merupakan sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk menilai kebijakan publik melalui analisis terhadap pendekatan, implementasi, *outcome*, serta dampaknya terhadap masyarakat. Tujuan utama dari tahapan ini adalah untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, dan perbaikan kebijakan di masa depan. Konsep ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat mendatangkan manfaat yang diharapkan dan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

Pada dasarnya, teori evaluasi kebijakan dapat ditelusuri ke beberapa kerangka kerja yang mendasari pada pemahaman tentang apa itu kebijakan dan bagaimana proses implementasinya berlangsung. Salah satu teori yang sering digunakan dalam evaluasi kebijakan adalah teori William N. Dunn yang menyatakan bahwa evaluasi harus dilakukan dengan memperhatikan enam kriteria utama, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (Putri et al., 2024; Rahmawati, 2024; Yanti, 2022). Kriteria-kriteria ini saling berkaitan dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan tersebut berfungsi dalam konteks nyata.

Dalam praktiknya, evaluasi kebijakan memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks dan tujuan dari kebijakan tersebut. Evaluasi dapat bersifat formatif atau sumatif (Warman et al., 2023). Evaluasi formatif dilakukan selama fase implementasi kebijakan untuk mengidentifikasi masalah dan perbaikan yang diperlukan, sementara evaluasi sumatif dilakukan setelah kebijakan dijalankan untuk menilai dampak keseluruhan dari kebijakan tersebut. Studi Haji dan Ulum menunjukkan bahwa penggunaan teori CIPP (Context, Input, Process, Product) dalam evaluasi sangat membantu dalam mengkaji berbagai aspek dari suatu kebijakan (Haji & Ulum, 2023).

Salah satu aspek penting dari evaluasi kebijakan adalah pengumpulan data yang akurat dan relevan. Metode kualitatif dan kuantitatif dapat digunakan secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh (Prayudha & Rajab, 2021). Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk penerima manfaat, pelaksana, dan pembuat kebijakan.

Meskipun berbagai teori dan pendekatan telah diajukan dalam evaluasi kebijakan, tantangan tetap ada, terutama dalam hal penerapan dan akuntabilitas. Sebagai contoh, kebijakan yang diterapkan dengan baik dapat menghadapi kendala dalam hal keterbatasan sumber daya atau dukungan politik yang tidak memadai (Azman & Saputra, 2025). Hal ini menuntut adanya kerangka kerja yang komprehensif untuk mendukung evaluasi yang efektif, mencakup pengembangan indikator, proses pengumpulan data yang transparan, dan mekanisme untuk merespons hasil evaluasi.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Creswell (2018) berpandangan jenis penelitian ini berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial atau masalah manusia dengan cara menggali pengalaman individu melalui data kualitatif yang berbentuk wawancara, observasi, dan dokumen. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses implementasi, ketepatan sasaran, serta dampak program terhadap keluarga penerima manfaat di wilayah studi.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada temuan awal yang menunjukkan adanya dinamika dan permasalahan dalam pelaksanaan PKH. Termasuk protes dari sebagian masyarakat yang merasa layak namun tidak terakomodasi sebagai penerima bantuan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi dan pengetahuan mereka terhadap permasalahan penelitian (Kumar, 2011).

Informan penelitian terdiri dari; (1) Koordinator PKH Kabupaten Pidie Jaya (2) Koordinator PKH Kecamatan Bandar Dua (3) Kepala desa (4) Keluarga penerima manfaat PKH (4) Keluarga yang tidak menerima PKH namun memiliki kondisi ekonomi kurang mampu. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi langsung terhadap pelaksanaan dan interaksi antara pihak pengelola PKH dan masyarakat; Wawancara mendalam dengan informan kunci untuk menggali perspektif, pengalaman, dan evaluasi mereka terkait pelaksanaan PKH; Studi dokumentasi terhadap data resmi, laporan pelaksanaan, dan arsip terkait kebijakan PKH di Kabupaten Pidie Jaya.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif model Miles et al (2014) yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi relevan terkait evaluasi kebijakan PKH, seperti ketepatan sasaran, efektivitas implementasi, perubahan perilaku penerima, dan indikasi pemberdayaan keluarga. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk matriks, tabel, bagan, atau narasi deskriptif untuk memudahkan identifikasi pola dan kecenderungan. Kesimpulan sementara ditarik selama proses analisis dan diverifikasi secara berulang melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas temuan.

## Hasil dan Pembahasan

### Efektivitas Program PKH di Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai strategi bantuan tunai bersyarat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan rumah tangga berpenghasilan rendah. Program ini memberikan bantuan keuangan kepada rumah tangga dengan syarat masyarakat penerima manfaat berinvestasi dalam layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anaknya. Efektivitas program PKH dapat dianalisis melalui berbagai perspektif, termasuk dampaknya terhadap penanggulangan kemiskinan, khususnya ketepatan penerima manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan PKH di Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH masih menghadapi tantangan yang menghambat efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian data penerima akibat pembaruan data di sistem (SINK-NG/DTKS) yang tidak dilakukan secara cepat, terutama terkait perubahan kondisi ekonomi warga. Akibatnya, terdapat keluarga yang layak menerima bantuan namun tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.

Temuan adanya data yang tidak akurat atau ketidaktepatan sasaran penerima manfaat PKH di Kecamatan Bandar Baru menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam manajemen basis data dan proses verifikasi di tingkat pelaksanaan. Berdasarkan temuan penelitian, dapat dipetakan empat titik rawan utama yang menjadi penyebab permasalahan ini.

Pertama, penetapan calon peserta mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPFM) yang tidak diperbarui secara berkala. Kondisi ini mengakibatkan dua konsekuensi: keluarga yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria kemiskinan tetap terdaftar sebagai penerima bantuan, sementara keluarga miskin baru yang seharusnya berhak tidak masuk dalam daftar penerima. Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data penerima mengikuti prosedur yang ketat, tetapi dalam pelaksanaannya, ada banyak kekurangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada penerima yang sudah tidak layak lagi menerima bantuan, karena status

ekonomi mereka telah berubah (Magfira & Saharuddin, 2022). Kesalahan dalam pembaruan data ini berpotensi menyebabkan ketidakadilan, di mana keluarga yang seharusnya mendapat bantuan malah tidak menerima, sementara yang sudah tidak membutuhkan tetap terdaftar sebagai penerima

Kedua, kesalahan verifikasi pada tahap validasi awal di lapangan, baik karena keterbatasan waktu, beban kerja pendamping yang tinggi, atau subjektivitas penilaian, memungkinkan peserta yang tidak memenuhi kriteria tetap lolos seleksi. Ketiga, proses pemutakhiran data dilakukan secara sporadis dan jarang, sehingga penerima yang sudah tidak layak misalnya karena kondisi ekonomi membaik masih terus mendapatkan bantuan. Keempat, lemahnya pendampingan dan monitoring yang disebabkan oleh kurang aktifnya pendamping atau tingginya beban kerja mengakibatkan penilaian kelayakan tidak akurat dan permasalahan di lapangan sulit terdeteksi secara cepat.

Keempat titik rawan ini saling terkait dan memperkuat dampak satu sama lain, sehingga menciptakan siklus ketidaktepatan sasaran yang sulit diputus. Ketidakakuratan data ini tidak hanya menurunkan efektivitas penyaluran bantuan, tetapi juga menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat, mengurangi kepercayaan publik terhadap program pemerintah, dan menghambat pencapaian tujuan utama PKH untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan strategi perbaikan berupa pemutakhiran data secara berkala, verifikasi lapangan yang berbasis bukti, serta sistem monitoring yang ketat dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Melalui evaluasi terus menerus dan penyesuaian strategi yang tepat, diharapkan PKH dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan.

### **Ketergantungan Keluarga Penerima Manfaat terhadap Bantuan PKH**

Ketergantungan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan fenomena yang tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi, tetapi juga struktur kesejahteraan sosial di tingkat lokal. PKH, yang dirancang sebagai program bantuan tunai bersyarat untuk mengentaskan kemiskinan, berfokus pada

peningkatan kualitas hidup keluarga kurang mampu melalui akses pendidikan, kesehatan, dan gizi. Secara umum, program ini telah terbukti membantu KPM memenuhi kebutuhan dasar dan menstabilkan kondisi finansial (Swandriano & Arif, 2023).

Namun, di Kecamatan Bandar Dua, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar KPM menjadikan PKH sebagai sumber pendapatan utama dan belum menunjukkan kemajuan signifikan menuju kemandirian ekonomi. Kondisi ini menunjukkan adanya pola *dependency mindset*, yaitu pandangan bahwa bantuan PKH adalah hak tetap, bukan stimulus sementara.

Penyebab ketergantungan ini berlapis. Pertama, rendahnya keterampilan dan akses terhadap peluang kerja menghambat KPM mencari sumber pendapatan alternatif. Kedua, kualitas pendampingan yang tidak merata memperlemah fungsi pemberdayaan. Pendamping seharusnya tidak hanya memandu penggunaan bantuan, tetapi juga membekali pengetahuan dan keterampilan agar KPM dapat bertransformasi menjadi mandiri (Wahyuni & Susilawati, 2022). Kurangnya intensitas dan efektivitas pendampingan berisiko membuat bantuan bersifat konsumtif semata.

Selain itu, dimensi sosial-budaya turut memperkuat pola ketergantungan. Studi Jatmiko et al. (2021) mengungkapkan bahwa meskipun kesejahteraan KPM meningkat setelah menerima PKH, banyak yang memilih tidak mengambil inisiatif mandiri ketika keberlanjutan bantuan tidak terjamin. Pola ini menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus, apalagi jika bantuan tidak disertai intervensi pemberdayaan ekonomi.

Ritonga et al. (2023) menekankan bahwa perilaku mengandalkan bantuan tanpa upaya proaktif memperkuat akar ketergantungan. Di Bandar Dua, situasi ini diperparah oleh masalah akurasi data, di mana masih terdapat penerima bantuan yang tidak layak dan keluarga miskin yang terlewat akibat keterlambatan pembaruan data. Hal ini menyebabkan program tidak hanya kurang tepat sasaran, tetapi juga berpotensi memupuk ketergantungan pada kelompok yang sebenarnya sudah mampu.

Dari sudut pandang kebijakan, evaluasi implementasi PKH di Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya perlu difokuskan pada dua aspek utama:

1. Akurasi sasaran penerima melalui pembaruan data yang lebih cepat dan metode seleksi yang transparan, seperti Simple Additive Weighting Letelay (2023) untuk meminimalkan penerima yang tidak tepat sasaran.
2. Penguatan komponen pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan, fasilitasi akses modal, dan pembukaan peluang kerja lokal agar bantuan berfungsi sebagai jembatan menuju kemandirian, bukan penyangga kebutuhan konsumtif jangka panjang.

Dengan demikian, tantangan terbesar bukan hanya memastikan PKH tepat sasaran, tetapi juga memastikan bahwa bantuan ini benar-benar menjadi sarana transisi menuju kemandirian ekonomi keluarga, sehingga siklus ketergantungan dapat diputus secara berkelanjutan.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, menunjukkan bahwa efektivitas program masih terkendala oleh dua masalah utama. Pertama, ketidakakuratan data penerima manfaat yang bersumber dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPFM) yang tidak diperbarui secara berkala. Kondisi ini menyebabkan masih terdapat keluarga yang tidak layak namun tetap terdaftar, sementara keluarga miskin yang memenuhi kriteria justru terlewat. Lemahnya proses verifikasi dan validasi, jarangya pemutakhiran data, serta keterbatasan pendampingan di lapangan semakin memperbesar peluang terjadinya ketidaktepatan sasaran.

Kedua, adanya kecenderungan ketergantungan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap bantuan PKH. Bantuan yang semestinya berperan sebagai stimulus menuju kemandirian justru dalam beberapa kasus memunculkan pola pikir pasif, sehingga keluarga penerima kesulitan keluar dari lingkaran kemiskinan. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan sistem pemutakhiran data, penguatan mekanisme verifikasi, serta pengembangan strategi pendampingan yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan perubahan perilaku KPM.

Verifikasi data PKH secara berkala dan pemberdayaan ekonomi keluarga perlu diperkuat guna mengatasi ketidakakuratan data serta mengurangi ketergantungan penerima manfaat

### Daftar Pustaka

- Argisitawan, A., Andriyani, W., DP, B. P., & Kristomo, D. (2022). Determining the Target of Independent Graduation for Beneficiary Families of the Hopeful Family Program. *Journal of Intelligent Software Systems*, 1(1), 55. <https://doi.org/10.26798/jiss.v1i1.601>
- Azman, W., & Saputra, D. (2025). Evaluasi Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Edukasi*, 13(1).
- Bangun, H., Siagian, M., & Humaizi, H. (2019). The Effectiveness of the Ministry of Social Family's Hope Program (Program Keluarga Harapan) in Increasing the Welfare of the District of Medan Johor. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(4), 125. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i4.956>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design. In *Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth). sage Publication.
- Erfain, Harianto, Ek., Titop, H., Haeruddin, Jawiah, Haeriyah, Lebang, N., & Togala, R. (2021). Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 108–117. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i3.40>
- Habapublik. (2025, January 12). *Warga Bandar Dua Pertanyaan Namanya Dicoret dari Daftar Penerima PKH dan BPNT*. <https://habapublik.com/2025/01/12/warga-bandar-dua-pertanyaan-namanya-dicoret-dari-daftar-penerima-pkh-dan-bpnt/>
- Haji, R., & Ulum, R. (2023). Evaluasi Program Bantuan Rumah Ibadah Kementerian Agama Menggunakan Model Cipp. *Journal of Religious Policy*, 2(2), 315–344. <https://doi.org/10.31330/repo.v2i2.41>
- Hartarto, R. B., & Wardani, D. T. K. (2023). Does conditional cash transfer change educational aspirations? Evidence from Indonesia. *International Journal of Social Economics*, 50(1), 148–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2021-0671>
- Jatmiko, U., Munir, M., & Jauhari, A. (2021). Disparitas Kesejahteraan Masyarakat Terdampak Covid 19 Sebelum dan Sesudah Adanya Program Keluarga Harapan (PKH). *SEIKO: Journal of Management & Business* SEIKO: Journal of Management & Business, 4(1), 74. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i1.929>

- Kumar, R. (2011). *Research Methodology: A step-by-step guide for beginners* (3rd ed.). Sage Publication.
- Kurniawan, A., Hakim, L., & Ramdani, R. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Karawang Barat. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 040. <https://doi.org/10.32662/gjgops.v4i1.1233>
- Letelay, K. (2023). Penerapan Metode Simple Additive Weighting Dalam Menentukan Kelayakan Penerima Program Keluarga Harapan (Pkh). *HOAQ (High Education of Organization Archive Quality): Jurnal Teknologi Informasi*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.52972/hoaq.vol14no1.p1-10>
- Magfira, & Saharuddin, E. (2022). Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Bantul. *TheJournalish: Social and Government*, 3(3), 207–218. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i3.273>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Sage Publication.
- Mursyidah, L. (2017). Efektivitas Program Bantuan Tunai Bersyarat Mengatasi Kemiskinan dan Kelaparan. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 5(2), 245–260. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i2.1882>
- Nuraida, N. (2019). Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 1(2), 148–165. <https://doi.org/10.37950/paj.vi.741>
- Pangestu, A. (2022). Decision Support System for Accepting Social Assistance for the Program Keluarga Harapan (PKH). *IJIIS: International Journal of Informatics and Information Systems*, 5(1), 38–46. <https://doi.org/10.47738/ijiis.v5i1.123>
- Prayudha, R., & Rajab, R. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Depok. *Public Service and Governance Journal*, 2(1), 96–107. <https://doi.org/10.56444/psgj.v2i1.596>
- Putri, M. A., Mefiana, N. S., Ambarwati, P. A., Hermawan, R. P., & Amira, Z. R. (2024). Evaluasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Lembang. *Jurnal Pariwisata Dan Perhotelan*, 1(3), 14. <https://doi.org/10.47134/pjpp.v1i3.2522>
- Rahmawati, D. A. (2024). Evaluation of the Use of the Electronic Based Public Complaints Application (Halomasbup) in Kediri Regency. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 8(2), 1199. <https://doi.org/10.58258/jisip.v8i2.6704>
- Ritonga, F. U., Suriadi, A., & Isworo, H. (2023). Analisis Pemetaan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dari Perspektif Kesejahteraan Sosial di Kabupaten

- Labuhanbatu Selatan. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 2(2), 87–102. <https://doi.org/10.32734/ljsp.v2i2.13491>
- Simarmata, N. L., & Siahaan, J. H. (2022). Assessing the Impact of the Family Hope Program on Mitigating Economic Underdevelopment in Berastagi City. *Law and Economics*, 16(2), 117–129. <https://doi.org/10.35335/laweco.v16i2.55>
- Swandriano, F. A., & Arif, M. (2023). Efektivitas Program Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 71. <https://doi.org/10.35906/jep.v9i1.1401>
- Taryono, Syapsan, Ekwarso, H., Kornita, S. E., Sari, L., & Darnilawati. (2023). Sustainability of Family Hope Program in Batu Bersurat Village, XIII Koto Kampar District, Kampar Regency, Riau, Indonesia. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 14(10), 32–42. <https://doi.org/10.7176/jesd/14-10-04>
- Wahyuni, R., & Susilawati, N. (2022). Pendampingan Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Nagari Silayang Kabupaten Pasaman. *Jurnal Perspektif*, 5(4), 629–638. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i4.693>
- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25–32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>
- Yanti, N. N. K. (2022). Evaluasi Kebijakan WFH Terhadap Pelayanan Publik Di Indonesia. *Jurnal Widya Publika*, 10(1), 18–26. <https://doi.org/10.70358/widyapublika.v10i1.823>
- Yasin, R., & Rizqie Aris, M. (2023). Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(11), 1112–1121. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i11.1853>
- Yunus, M., & Fardania, F. (2024). The Effectiveness of the Family Hope Program in Efforts to Control Proverty in Bekasi Regency. *Perspektif*, 13(2), 589–597. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i2.10962>